NEGARA FEDERAL DAN EKSISTENSINYA
Nama : M. Ramadhan
Email: muhammadramadhann1112@gmail.com
No BP : 2110003600016
Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Federal merupakan sebuah kata yang sering diungkapkan orang dalam melihat sebuah bentuk negara. Setiap negara dari suatu bangsa pada umumnya didirikan melalui proses penyatuan. Dalam konteks ini, proses penyatuan merupakan suatu alasan sekaligus pendekatan atau cara membentuk negara termasuk di dalamnya membentuk negara federal. Adapun, proses pembentukan negara federal melalui perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal seringkali disebabkan oleh ketentuan-ketentuan internal. Keinginan membentuk negara federal paling tidak diawali dengan kedua kejadian sebelumnya pertama. Tingkat sentralisasi kekuatan yang sangat tinggi. Kedua, kekuatan sentrifugal yang disebabkan perbedaan-perbedaan tajam antar kelompok yang dapat mengarah kepada gerakan yang bersifat kedaerahan dan pemisahan.

Negara bagian merupakan suatu wilayah administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara berserikat. Banyak negara yang memiliki konstitusi federal memiliki wilayah ini, yang kadang disebut negara bagian (state, estado), tanah (länder) atau provinsi (province, provincia). Dalam kebanyakan hal wilayah-wilayah negara bagian ini adalah dibentuk oleh pemerintah federal atau pusat. Sebagian besar negara di dunia memilih bentuk negara Federal atau Kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemilihan bentuk negara ini didasarkan kemauan politik, sosial budaya serta sejarah dari sebuah negara. Masing-masing bentuk negara ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Negara Kesatuan menitikberatkan penyelenggaraan pemerintahan pada pemerintahan pusat dan daerah-daerah di propinsi tidak mempunyai otonomi yang luas dalam mengurus daerahnya. Lain halnya dengan Negara Federal dimana kedudukan Negara Federal dan Negara Bagian sederajat. Negara Bagian diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus daerah mereka.

Sebuah federasi dikatakan sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, yang biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan sebuah negara kesatuan, ialah adanya keseragaman antar semua provinsi.

B. PEMBAHASAN

Negara federal, dilihat dari asal usulnya, kata “federal” berasal dari kata Latin, feodus, yang artinya liga. Liga negara-negara kota yang otonom pada zaman Yunani kuno dapat dipandang sebagai negara federal yang mula-mula. Model negara federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing negara atau wilayah-wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah federal.

Sebagai tatanan konstitusional dan kelembagaan politik, federasi lebih desentralis dibandingkan “Devolusi” kepada pemerintahan perdesaan perkotaan, metropolitan/daerah. Selain itu desentralisasi dalam tatanan federal berbeda dari devolusi karena badan pemerintahan memperoleh kekuasaannya tidak dari pemerintahan nasional (seperti dalam negara kesatuan), melainkan dari konstitusi yang juga menjadi sumber ketentuan yuridiksi pemerintahan pusat. Dalam hal ini, keduanya, yaitu pemerintahan pusat dan federal dan satu satuan yang tercakup didalamnya bersifat koordinat dan independen satu sama lain.

Sifat dasar negara federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dengan unit federal. Ada tiga hal yang membedakan Negara Federal satu sama lainnya: pertama, cara pembagian kekuasaan antara pemerintah Federal dengan pemerintah negara bagian; Kedua, bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi di atas otoritas Federal dan otoritas negara jika muncul konflik di antara keduanya; ketiga, menurut cara perubahan konstitusi jika dikehendaki adanya perubahan semacam itu.

Salah satu ciri Negara Federal adalah bahwa ia mencoba menyelesaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan Negara Federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan ke luar dari negara-negara bagian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan Federal Untuk membentuk suatu Negara Federal menurut C.F Strong diperlukan dua syarat, yaitu: Pertama adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk sederasi itu, dan Kedua adanya keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengadakan ikatan terbatas, oleh karena itu apabila kesatuan-kesatuan politik itu menghendaki persatuan sepenuhnya, maka bukan federasi lah yang akan di bentuk, melainkan Negara Kesatuan.

Hubungan antara satuan Federal dengan negara bagian merupakan hubungan kenegaraan. Tidak hanya mengenai fungsi penyelenggaraan administrasi negara. Hubungan meliputi juga di bidang kekuasaan kehakiman dan pembentukan undang-undang.

Pengertian Federal dapat dibedakan atas tiga jenis berikut;

- a. Negara dengan sisten Negara Federal murni yang dengan tegas merumuskan negaranya dalam konstitusiunya sebagai Negara Fedeeral sebanyak 18 Negara
- b. Negara dalam bentuk federal Arrangment, yang tidak memaklumkan diri sebagai Federal, tetapi di dalam sistem pemerintahannya otonomi begitu kuat sehingga jauh lebih dekat pada sitem Federal sebanyak 17 Negara.
- c. Bentuk negara dan pemerintahan yang disebut sebagai associated state. Negeranya

sudah jadi tetapi hidupnya sendiri di anggap sulit.

David solomon memberikan ciri ciri negara federal sebagai berikut:

- Pemerintahan pusat mempunyai kekuasaan penuh atas nama negara bagian dalam berhubungan dengan negara negara lain.
- Pemerintahan dibagi diantara pemerintahan pusat dan sejumlah pemerintaha negara bagaian. kecuali ditentukan lain oleh konstitusi, masing masing mempunyai kedaulatan tersendiri.
- Kekuasaan diantara pemerintahan pusat dengan pemerintahan negara bagian diatur sedemikian rupa sehingga masing masing pemerintahan berpengaruh langsung terhadap warga negara.
- Biasanya, terdapat badan peradilan yang berfungsi sebagai penengah.

Menurut hans kelsen, tatanan hukum negara federal terdiri atas norma norma pusat yang berlaku bagi seluruh teritorial dan norma norma daerah yang hanya berlaku bagian bagian dari teritorial ini, bagi teritotial dan negara negara komponennya. Negara negara federal ditandai oleh fakta bahwa negara negara bagian memiliki suatu derajat otonomi konstitusional, yaitu organ legislatif dari masng masing negara bagian berkompeten dalam masalah masalah menyangkut konstitusi dari masyarakat ini otonomi konstitusional dari negara negara bagian ini terikat oleh prinsip prinsip konstitusonal tertentu dari konstitusi federasi.

Biasannya sebuah negara federal akhir melalui suatu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara negara merdeka. Fakta bahwa masing masing negara bagian memiliki jumlah wakil yang sama didalam senat pembuktian. Bahwa negara anggota pada mulanya adalah negara negara merdeka dan masih tetap harus diperlakukan prinsip hukum internasional yang dikenal sebagai persamaan negara negara. Komposisi dewan perwakilan negara atau senat menjamin bahwa negara negara anggota yakni masyarakat masyarakat daerah dengan cara demikian turut serta dalam prosedur pembuatan undang uandng pusat yang sama dengan sama satu unsur desentralisas. Akan tetapi, unsur desentralissi berdasarkan pada ide persamaan dari

negara negara anggota ini hampir seluruhnya dinetralisasi oleh fakta bahwa dewan perwakilan negara menerima atau menetapkan resolusi resolusinya menurut prinsip mayoritas.

Model negara kesatuan, asumsi dasarnya berbeda secara diametrik dari negara federal. Formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara. Tidak ada kesepakatan para penguasa daerah, apalagi negara bagian, karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk didalamnya bukanlah bagian wilayah yang bersifat independen. Dengan dasar itu maka negara membentuk negara atau wilayah-wilayah yang kemudian diberikan kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya.

Didalam negara federal, bukan hanya kompetensi legislatif yang dibagi diantara negara federal dan negara bagian melainkan juga kompetensi yudikatif, dan administratif. Disamping pengadilan federal ada pengadilan negara bagian disamping organ administratif federasi, ada organ negara bagian. Mahkamah agung dari negara federal tidak hanya berkompeten untuk menyelesaikan konflik tertentu dan untuk menghukum kejahatan tertentu dari orang-orang perseorangan tetapi juga berkompeten untuk memutuskan konflik konflik negara bagian.

Didalam sistem yang federalistik, unit-unit politik memiliki otonomi secara utuh, baik yang menyangkut wewenang eksekutif, ataupun legislatif, dan juga bahkan menyangkut kekuasaan yudikatif. Didalam sistem ini diakui pula mekanisme berbagi kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan negara bagian, dan antara pemerintahan negara bagian dengan pemerintahan daerahnya. Struktur pemerintahan dalam negara bagian dengan pemerintahan daerah pada dasarnya sama. Yang membedakannya secara mencolok dengan sistem pemerintahan yang unitaristik adalah yang menyangkut kedaulatan. Dalam federalisme, kedaulatan diperoleh dari unit-unit politik yang berpisah-pisah dan kemudian sepakat membentuk sebuah pemerintahan

bersama. Sementara itu, di dalam pemerintahan yang unitaristik kedaulatan langsung bersumber dari seluruh penduduk dalam negara tersebut.

C. PENUTUP

Federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang terdiri dari negara-negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk suatu kesatuan bernama negara federal, masing-masing negara bagian memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintahan negara bagian. Sebagai tatanan konstitusional dan lembaga politik, federasi lebih desentralis dibandingkan devolusi kepada pemerintahan pedesaan, perkotaan, metropolitan, atau daerah.

Sifat dasar Negara Federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah Federal dengan unit Federal. Hubungan antara satuan Federal dengan negara bagian merupakan hubungan kenegaraan. Negara Federal ditandai oleh fakta bahwa negara memiliki suatu derajat otonomi konstitusional. Otonomi konstitusional dari negara-negara bagian ini terikat oleh prinsip-prinsip konstitusional tertentu dari konstitusi Federasi. Apabila suatu kesatuan politik seperti negara berdaulat memilih untuk bergabung dengan suatu federasi sebagai negara bagian, maka negara bagian tersebut akan kehilangan kedudukan mereka sebagai suatu kesatuan politik yang terikat oleh hukum internasional. Sementara federasi yang menaungi negara bagian tersebut dianggap sebagai suatu negara berdaulat yang terikat oleh hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatara Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201.
<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan

- Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, *Padjadjaran Journal of Law*, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *Supremasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, *Kertha Patrika*, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, *Dialogica Jurnalica*, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, *UIR Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, *Doctrinal*, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesia through International Regulation Ratification*, *Journal of Innovation, Creativity and Change* Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, *Jurnal Yuridis*, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review*, Volume 2, Nomor 3, 2020..